



Strategi Pertahanan Belanda di Kutaraja (1884-1898): Peranan Concentratie Stelsel dalam Perang Aceh

Cut Mila Mandasari¹, Saryulis²

¹Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, ²Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
Email Konfirmasi: cutmilamandasari@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi pertahanan Belanda di Kutaraja antara tahun 1884 hingga 1898, dengan fokus pada penerapan sistem lini konsentrasi sebagai respons terhadap perlawanan rakyat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah pembentukan lini konsentrasi, pentingnya strategi ini dalam konteks dominasi militer Belanda, serta reaksi pejuang Aceh terhadap kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah kritis dengan analisis deskriptif, mengandalkan kajian pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lini konsentrasi, yang melibatkan penempatan pos-pos militer dalam formasi terstruktur, memungkinkan Belanda untuk mengendalikan wilayah dan mengurangi biaya operasional. Dengan membangun pos pertahanan di area seluas 50 km², Belanda dapat memantau aktivitas masyarakat dan mencegah pemberontakan. Meskipun strategi ini meningkatkan efisiensi logistik, dampak negatifnya terhadap masyarakat Aceh sangat signifikan, termasuk penghancuran situs-situs budaya dan peningkatan beban ekonomi akibat kerja paksa yang diterapkan kepada rakyat. Rakyat Aceh, dipimpin oleh ulama dan panglima, terus melawan dengan semangat jihad fi sabilillah, menandakan ketahanan mereka dalam menghadapi kolonialisme. Perlawanan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis dan kultural, mencerminkan komitmen masyarakat Aceh untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika konflik dan strategi kolonial yang relevan dalam konteks sejarah Indonesia, serta pentingnya memahami warisan sejarah dalam membangun kesadaran kolektif bangsa. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian lebih lanjut mengenai dampak kolonialisme dan perlawanan di Indonesia.

Kata Kunci: Perang Aceh, Kolonia Belanda, Concentratie Stelsel, Strategi Militer, gerakan perlawanan

ABSTRACT

This article examines the Dutch defense strategy in Kutaraja from 1884 to 1898, focusing on the implementation of the concentration system as a response to the resistance of the Acehnese people. The study aims to analyze the historical formation of the concentration line, the significance of this strategy within the context of Dutch military dominance, and the reactions of Acehnese fighters to this policy. The methodology employed is a critical historical approach with descriptive analysis, relying on literature review to gather data from various primary and secondary sources. The findings indicate that the concentration line, which involved the placement of military posts in a structured formation, enabled the Dutch to control the territory and reduce operational costs. By establishing defensive posts over an area of 50 km², the Dutch were able to monitor community activities and

prevent uprisings. Although this strategy enhanced logistical efficiency, its negative impact on the Acehese community was significant, including the destruction of cultural sites and the increased economic burden due to forced labor imposed on the populace. The Acehese, led by ulama and military commanders, continued to resist with the spirit of *jihad fi sabilillah*, demonstrating their resilience against colonialism. This resistance was not only military in nature but also ideological and cultural, reflecting the commitment of the Acehese people to defend their sovereignty. This research provides insights into the dynamics of conflict and colonial strategies relevant to the historical context of Indonesia, as well as the importance of understanding historical legacies in fostering national collective awareness. Consequently, this article is expected to contribute to further studies on the impacts of colonialism and resistance in Indonesia.

Keywords: Aceh War, Dutch colonialism, Concentratie Stelsel, Military Strategy, Resistance Movements

Pendahuluan

Aceh dikenal sebagai wilayah pertama di Nusantara yang menerima dan mengembangkan ajaran Islam. Kedatangan Islam memberikan pengaruh besar terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh yang hingga kini masih sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Posisi geografis Aceh yang strategis di ujung utara Pulau Sumatra menjadikannya pintu masuk utama bagi pengaruh luar, termasuk dari bangsa-bangsa besar dunia seperti Arab, Persia, India, bahkan Eropa. Interaksi ini tidak hanya memperkaya kebudayaan Aceh, tetapi juga menumbuhkan semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan, khususnya terhadap dominasi kekuatan kolonial seperti Belanda (Djajadiningrat, 1911; Reid, 1979).

Sejak awal agresi militer Belanda ke Aceh pada tahun 1873, perlawanan dari rakyat Aceh berlangsung sengit dan konsisten. Para pejuang lokal yang didorong oleh semangat keagamaan dan nasionalisme lokal terus memberikan perlawanan tanpa henti. Hal ini menyebabkan Belanda kewalahan, karena strategi militer konvensional yang mereka gunakan tidak mampu menundukkan kekuatan gerilya Aceh yang fleksibel dan menyebar di berbagai pelosok. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah kolonial akhirnya mengembangkan strategi pertahanan baru yang dikenal sebagai *concentratie stelsel* atau sistem konsentrasi (Van Dijk, 1981).

Sistem ini mulai diterapkan pada 20 Agustus 1884, dengan membentuk zona militer terstruktur seluas 50 kilometer persegi di sekitar Kutaraja (kini Banda Aceh). Zona ini dilengkapi dengan enam belas pos militer yang saling terhubung dan memiliki Kutaraja sebagai pusat komando (Hurgronje, 1906). Salah satu inovasi penting dalam pelaksanaan strategi ini adalah pembangunan jaringan transportasi militer berupa *Atjeh Tram*, yaitu jalur kereta api yang menghubungkan benteng-benteng militer dalam lini konsentrasi tersebut. Jalur ini dirancang tidak hanya untuk mobilisasi pasukan, tetapi juga untuk mendukung logistik dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat lokal (Cribb, 2001).

Seiring berjalannya waktu, pembangunan jalur ini diperluas ke berbagai daerah di luar Kutaraja, seperti Lambaro, Seulimum, dan Padang Tiji. Namun, medan geografis yang sulit, terutama di wilayah perbukitan dan pegunungan, membuat proyek ini menelan

biaya yang besar dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Meskipun demikian, pihak kolonial menganggap strategi ini lebih berhasil dibandingkan pendekatan sebelumnya karena secara signifikan memperkuat posisi militer dan ekonomi Hindia Belanda di Aceh (Said, 1998).

Di sisi lain, masyarakat Aceh menanggapi pembangunan lini konsentrasi ini sebagai bentuk penjajahan yang semakin mengakar. Mereka tidak melihat adanya alasan untuk menghormati pembangunan yang dilakukan oleh penjajah, terutama karena sistem ini membatasi ruang gerak mereka dan menindas kebebasan. Meskipun begitu, dalam konteks sejarah modern Aceh, sistem *concentratie stelsel* meninggalkan warisan berupa infrastruktur awal kereta api yang pernah ada di daerah tersebut. Salah satu sisa peninggalan sejarah itu adalah gerbong Atjeh Tram yang kini berada di halaman swalayan Barata, Banda Aceh. Namun, minimnya kesadaran masyarakat tentang nilai sejarah infrastruktur tersebut menunjukkan lemahnya upaya pelestarian dan edukasi sejarah di tingkat lokal.

Hingga kini, istilah lini konsentrasi masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Aceh. Bukti fisik seperti rel kereta api pun nyaris tidak terlihat, kecuali hanya tertinggal pada nama-nama jalan seperti “Jalan Rel Kereta Api Lama” di Lambaro. Banyak artefak sejarah yang telah hilang, rusak, atau bahkan dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menandakan bahwa perhatian pemerintah terhadap pelestarian peninggalan sejarah kolonial, khususnya yang berkaitan dengan strategi militer seperti *concentratie stelsel*, masih sangat minim (Ismail, 2010).

Dengan melihat kenyataan tersebut, penting untuk terus mengkaji sejarah Aceh, terutama aspek strategis kolonialisme Belanda yang berupaya menguasai wilayah ini melalui berbagai cara. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami strategi pertahanan Belanda di Kutaraja antara tahun 1884 hingga 1898, periode ketika *concentratie stelsel* mulai dibentuk hingga mulai ditinggalkan. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada saran strategis Jenderal A.W.P. Weitzel dan pelaksanaan sistem pertahanan yang berujung pada konsolidasi kekuasaan Belanda di Aceh menjelang abad ke-20.

Kajian ini diharapkan mampu menambah pemahaman historis tentang bagaimana kolonialisme beroperasi tidak hanya melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui strategi ruang dan infrastruktur. Dengan memahami strategi pertahanan kolonial secara mendalam, generasi penerus dapat lebih waspada terhadap bentuk-bentuk penjajahan baru yang tidak selalu berbentuk kekerasan militer, tetapi bisa hadir dalam bentuk dominasi ekonomi, budaya, bahkan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode sejarah kritis melalui empat tahap utama untuk menganalisis strategi pertahanan Belanda di Kutaraja (1884-1898). Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer seperti buku *De Atjeh-Oorlog* (Van 't Veer, 1985) dan serta sumber sekunder dari berbagai perpustakaan khusus

sejarah Aceh. Pada tahap kritik sumber, dilakukan verifikasi internal dengan membandingkan konsistensi antar dokumen dan mengidentifikasi bias naratif, khususnya dalam laporan kolonial Belanda. Proses interpretasi melibatkan analisis mendalam terhadap faktor penyebab kegagalan Concentratie Stelsel, dengan pendekatan multidisiplin yang menghubungkan bukti arsip, peta historis, dan tradisi lisan Aceh. Tahap akhir historiografi menyajikan temuan secara sistematis dalam struktur bab yang mencakup analisis desain benteng, dan dampak sosialnya, mengacu pada standar penulisan sejarah Kuntowijoyo (2003). Penelitian ini mengatasi keterbatasan sumber kolonial melalui triangulasi data dan *counter-narrative* dari naskah Aceh seperti Hikayat Prang Sabi, sekaligus menyoroti perlunya preservasi situs bersejarah yang tersisa di Banda Aceh. Kerangka metodologis ini tidak hanya relevan untuk studi sejarah militer kolonial, tetapi juga memberikan model analisis untuk penelitian konflik *asymmetris* di wilayah lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat serta Selat Malaka di sebelah utara dan timur. Lokasi ini menjadikan Aceh sebagai titik strategis dalam jalur perdagangan internasional, khususnya melalui Selat Malaka yang telah sejak lama menjadi lintasan utama kapal-kapal dagang dari berbagai kawasan Asia, termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok (Reid, 1993). Kondisi geografis ini menjadikan Aceh sebagai pintu masuk utama bangsa asing ke wilayah kepulauan Indonesia, yang pada awalnya datang untuk berdagang dan menjalin hubungan diplomatik, tetapi kemudian berkembang menjadi keinginan untuk menguasai dan memaksakan sistem kolonialisme dan imperialisme.

Kehadiran kekuatan asing yang cenderung ekspansionis memicu reaksi perlawanan dari rakyat Aceh. Bentuk resistensi yang muncul tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis dan kultural. Perang Aceh yang meletus sejak tahun 1873 tidak semata-mata dipicu oleh kepentingan politik atau ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh semangat keagamaan yang kuat. Hal ini tercermin dari istilah yang digunakan oleh masyarakat Aceh dalam menyebut perang tersebut, seperti Prang Beulanda (Perang Belanda), Prang Gompeuni (Perang Kompeni), Prang Kaphe (Perang Kafir), dan Prang Sabi (Perang di Jalan Allah) (Alfian, 2006).

Motivasi keagamaan menjadi kekuatan utama dalam membakar semangat juang rakyat Aceh. Hikayat Prang Sabi, sebuah karya sastra keagamaan lokal yang populer pada masa itu, menyerukan jihad melawan penjajah sebagai kewajiban agama. Dalam naskah tersebut, disebutkan bahwa siapa pun yang gugur dalam pertempuran melawan kaum kafir akan dianggap sebagai syahid dan dijanjikan surga. Salah satu kutipan syair dalam Hikayat Prang Sabi berbunyi:

*"Soe yang prang kaphe lam prang sabi, Niet petinggi hak agama,
Kalimat Allah agama Islam, Kaphe jahannam asoe nuraka.
Sabilullah geupeunan prang, Tuhan pulang page syeuruga,
Ikut suroh sampoe janji, Pahala Page that sempurna."*

Terjemahannya:

*"Yang memerangi kafir di medan sabil, niat meninggikan hak agama,
Kalimat Allah agama Islam, kafir adalah penghuni neraka.
Sabilullah disebut perang, Tuhan berikan akhir dengan surga,
Mengikuti perintah hingga ajal, pahala kelak sangat sempurna."*

Syair ini merepresentasikan dimensi spiritual yang menjadi landasan perjuangan rakyat Aceh. Perang melawan kolonialisme dianggap sebagai bentuk jihad fi sabilillah, yakni perjuangan suci di jalan Allah. Nilai-nilai inilah yang kemudian memperkuat solidaritas dan ketahanan masyarakat Aceh dalam menghadapi kekuatan militer kolonial yang lebih unggul dalam hal teknologi dan persenjataan.

Bukti visual dari semangat perjuangan tersebut banyak ditemukan dalam dokumentasi fotografis yang dibuat oleh pihak Belanda. Meskipun pada saat itu bangsa Indonesia belum memiliki teknologi untuk mendokumentasikan peperangan, foto-foto peninggalan Belanda menunjukkan keberanian dan kesiapan rakyat Aceh dalam menghadapi serangan. Bahkan, perempuan Aceh juga terlibat aktif dalam peperangan dan menunjukkan keberanian luar biasa yang membuat Belanda tercengang (Van 't Veer, 1948).

Menurut laporan militer Belanda, rakyat Aceh dikenal sebagai kelompok yang sangat militan dan fanatik dalam mempertahankan tanah air serta keyakinannya. Mereka lebih memilih mati syahid daripada tunduk kepada penjajah. Dinyatakan pula bahwa sekitar 100.000 jiwa rakyat Aceh tewas dalam peperangan yang berlangsung selama puluhan tahun (Gelman Taylor, 2009).

Sikap militan ini juga tercermin dalam ungkapan masyarakat Aceh, yaitu "halal darahnya apabila ia mengganggu agamaku." Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa mereka bersedia mengorbankan nyawa demi mempertahankan keyakinan dan kedaulatan spiritual. Dengan demikian, semangat keagamaan menjadi fondasi ideologis utama perlawanan Aceh terhadap kolonialisme.

Keadaan Sebelum Perang Aceh

Hubungan antara Kesultanan Aceh dan Belanda pada awalnya berlangsung secara damai selama lebih dari dua abad. Pada masa kekuasaan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), perhatian Belanda lebih terfokus pada penguasaan jalur perdagangan di wilayah Nusantara. Namun, setelah keruntuhan VOC dan pengalihan kekuasaan ke tangan

pemerintah kolonial Belanda, orientasi kebijakan berubah menjadi perluasan pengaruh politik dan kedaulatan atas seluruh Pulau Sumatera, termasuk wilayah Kesultanan Aceh (Reid, 1979).

Keretakan hubungan mulai terlihat setelah ditandatanganinya Traktat Pidie pada tahun 1819 antara Kesultanan Aceh dan pihak Inggris. Traktat ini lahir dari konteks politik internal Kesultanan, di mana perebutan kekuasaan antara Sultan Syaiful Alam Syah dan Sultan Jauhar Alam Syah dimanfaatkan oleh Stamford Raffles, perwakilan pemerintah Inggris, untuk memperkuat pengaruhnya. Melalui traktat tersebut, Aceh dan Inggris sepakat menjalin kerja sama dalam bidang politik dan ekonomi yang dituangkan dalam sembilan pasal perjanjian (Djajadiningrat, 1911). Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa kedua pihak akan saling membantu apabila salah satu diserang oleh pihak luar.

Belanda memandang traktat tersebut dengan penuh kecurigaan, khawatir bahwa Inggris akan menjadikan Aceh sebagai wilayah pengaruhnya. Kekhawatiran ini mendorong penandatanganan Traktat London pada 17 Maret 1824 antara Inggris dan Belanda. Traktat ini mengatur pembagian wilayah pengaruh di wilayah Hindia Belanda dan Semenanjung Melayu, serta membatalkan perjanjian sebelumnya antara Inggris dan Aceh. Melalui traktat tersebut, Inggris menyerahkan wilayah seperti Sibolga dan Natal kepada Belanda, sehingga memungkinkan Belanda memperluas kontrolnya ke pesisir timur dan barat Aceh (Tarling, 1992).

Untuk memperkuat pengaruhnya, Belanda mulai menjalankan praktik intervensi politik, termasuk spionase terhadap sistem pemerintahan dan kekuatan militer Aceh. Ketegangan meningkat seiring dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada 9 Mei 1857. Belanda kemudian memaksakan penandatanganan Perjanjian Siak pada Februari 1858, yang menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera Timur berada di bawah kedaulatan Belanda. Setelah melalui negosiasi panjang dengan Inggris, perjanjian ini kemudian diubah menjadi Traktat Sumatera (1871), yang secara eksplisit memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah Pulau Sumatera, dan pada saat yang sama melarang Inggris turut campur dalam urusan Sumatera (Ricklefs, 2008).

Kesultanan Aceh sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat merasa diabaikan keberadaannya dalam berbagai traktat yang dibuat antara kekuatan kolonial. Sebagai respon, Kesultanan Aceh berupaya mencari dukungan internasional dari negara-negara sahabat seperti Kesultanan Utsmaniyah (Turki), Amerika Serikat, dan Italia. Pada Oktober 1872, Pemerintah Hindia Belanda mengutus Panglima Tibang sebagai perantara untuk menyampaikan surat diplomatik dari Residen Riau, Schiff, kepada Sultan Mahmud Syah. Dalam surat tersebut, Belanda mengusulkan pembahasan penyelesaian masalah bilateral. Namun, Sultan Aceh menunda pertemuan karena sedang menantikan hasil diplomasi luar negeri ke Turki (Djajadiningrat, 1911).

Dalam perjalanan kembali ke Aceh pada Januari 1873, Panglima Tibang singgah di Singapura dan melakukan pembicaraan dengan Konsulat Amerika (Mayor Studer) dan

Italia, yang menyambut baik permintaan dukungan dari Kesultanan Aceh. Bahkan Konsulat Italia menjanjikan bantuan berupa dua kapal. Namun, informasi ini kemudian dibocorkan oleh Mohammad Arifin kepada Konsulat Belanda, Read, yang menafsirkannya sebagai bentuk pengkhianatan dan provokasi terhadap Belanda (Van 't Veer, 1948).

Menanggapi laporan tersebut, Konsulat Belanda segera mengirimkan telegram ke Gubernur Jenderal Loudon di Batavia yang kemudian memerintahkan pengiriman ekspedisi militer ke Aceh. Komisaris F.N. Nieuwenhuyzen ditugaskan untuk memaksa Sultan Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Ultimatum tersebut ditolak oleh Sultan Mahmud Syah, sehingga pada 26 Maret 1873, Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh (Alfian, 2006).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik antara Aceh dan Belanda bukanlah sekadar benturan senjata, melainkan konflik multidimensional yang melibatkan diplomasi internasional, pelanggaran perjanjian, intervensi politik, serta reaksi terhadap ekspansi kolonialisme. Sejak penandatanganan Traktat Pidie (1819), terlihat bahwa Belanda terus berupaya mengamankan hegemoninya melalui berbagai instrumen diplomatik dan militer, yang akhirnya memicu perlawanan terbuka dari rakyat Aceh.

Perang Aceh

Kegagalan Belanda dalam pendaratan militer pertama di Aceh (1873) memberikan pukulan psikologis dan politis yang signifikan terhadap otoritas kolonial. Rasa malu atas kekalahan tersebut mendorong Belanda untuk merancang strategi baru yang lebih terorganisir dan brutal dalam agresi militer kedua. Salah satu langkah awal yang diambil adalah mengirimkan mata-mata ke Aceh, di antaranya George Lavino, seorang petualang yang lihai memanfaatkan situasi. Lavino memainkan peran penting dalam melemahkan jaringan luar negeri Aceh, terutama dengan mengacaukan Panitia Delapan di Pulau Pinang, yang berfungsi sebagai penghubung logistik dan diplomatik Aceh di luar negeri (Ismail, 2004).

Panitia Delapan yang dipimpin oleh Teuku Paya terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Said Ahmad, Tuanku Hasyim, dan Teuku Ibrahim. Mereka bertugas menyuplai senjata dan logistik dari Pulau Pinang serta melobi negara lain untuk mendapatkan dukungan internasional. Namun, upaya ini mulai diganggu oleh aksi-aksi spionase Lavino yang berhasil melemahkan komunikasi Aceh dengan luar negeri. Di sisi lain, utusan Aceh seperti Habib Abdurrahman Al-Zahir yang dikirim ke Turki untuk mencari dukungan kekuatan Islam internasional tidak segera memberikan kabar hasil misinya, menambah tekanan terhadap kepemimpinan Aceh (Ali, 2011).

Belanda menyusun kekuatan militer yang masif untuk menghadapi Aceh dalam agresi kedua. Mereka merekrut tentara dari berbagai wilayah, termasuk dua ribu serdadu dari Eropa dan Afrika. Iming-iming gratifikasi finansial membuat banyak orang bersedia ikut dalam ekspedisi ke Aceh. Akan tetapi, realisasinya tidak sesuai janji. Serdadu Afrika

yang dijanjikan 800 gulden per orang, misalnya, justru ditelantarkan dan sebagian besar kembali ke Liberia dalam kondisi memprihatinkan (Hasan, 1990).

Dalam pelayaran dari Batavia ke Aceh, kondisi kapal yang sempit dan musim penghujan menyebabkan penyebaran wabah kolera yang luas di kalangan pasukan Belanda. Wabah ini bahkan menewaskan puluhan prajurit sebelum sempat bertempur. Ketika mendarat di Aceh pada November 1873, penyakit ini turut menyebar ke penduduk lokal, sehingga muncul tuduhan bahwa Belanda sengaja menyebarkan wabah sebagai bagian dari strategi perang biologis. Ketidadaan karantina kapal sebelum pendaratan memperkuat kecurigaan ini (Ismail, 2004).

Pada 6 Januari 1874, Belanda berhasil merebut dan membakar Masjid Raya Baiturrahman. Kemenangan ini dilanjutkan dengan pendudukan istana (dalam) pada 15 Januari. Meski begitu, pertempuran sengit sebelumnya telah menguras kekuatan kedua belah pihak. Sultan Mahmud Syah II, pemimpin Aceh saat itu, wafat pada 28 Januari akibat kolera. Belanda kemudian mengklaim kemenangan total dan mengeluarkan proklamasi resmi pada 31 Januari 1874, menyatakan bahwa Kesultanan Aceh telah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda (Ali, 2011).

Namun, klaim Belanda tersebut tidak diakui oleh rakyat Aceh. Tak lama kemudian, rakyat mengangkat Sultan Muhammad Daud Syah sebagai pemimpin baru, meskipun ia masih di bawah umur. Sebagai pemangku kekuasaan, Tuanku Hasyim Banta Muda memimpin perjuangan rakyat Aceh. Dalam respons terhadap pendudukan Belanda, musyawarah besar dilakukan di bawah pimpinan Teuku Imeum Luengbata dan Teuku Lamnga. Hasil musyawarah tersebut menetapkan prinsip “perang sabil” melawan penjajahan, serta menetapkan tujuh poin aturan jihad yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari rakyat hingga ulama (Hasan, 1990).

Di sisi lain, Belanda mulai menerapkan *Concentratie Stelsel* secara efektif. Sistem ini memusatkan kekuatan militer pada titik-titik strategis, terutama di Kutaraja, dan membangun pos-pos pertahanan di sekitar wilayah tersebut. Kolonel J.L.J.H. Pel, yang menggantikan Van Swieten, memperkuat sistem ini dengan mendirikan pos-pos di Krueng Aceh dan Meuraksa guna menekan mobilitas pejuang Aceh dan memotong jalur komunikasi serta logistik mereka (Ismail, 2004).

Setelah menguasai sebagian Aceh Besar, Belanda mulai melakukan pendekatan politik dengan para uleebalang (bangsawan lokal). Mereka menandatangani perjanjian yang dikenal dengan *Korte Verklaring* (Deklarasi Singkat). Perjanjian ini berisi enam pasal yang pada intinya menempatkan para uleebalang sebagai wakil Belanda di wilayahnya masing-masing. Dalam imbalannya, para uleebalang diberi gaji dan kekuasaan administratif serta yudisial, menjadikan mereka sebagai “raja cilik” yang loyal terhadap kolonialisme (Ali, 2011).

Namun, pendekatan politik ini justru menimbulkan resistensi baru. Para uleebalang yang dianggap pengkhianat mulai dimusuhi rakyat dan ulama. Di beberapa wilayah seperti Pidie, muncul perlawanan hebat terhadap para pemimpin lokal yang bersekutu

dengan Belanda. Serangan sporadis dari pasukan Aceh terus berlanjut, dan sering kali berhasil menembus garis pertahanan Belanda, menunjukkan bahwa penguasaan wilayah secara administratif tidak identik dengan penguasaan secara militer dan sosial (Hasan, 1990).

Situasi semakin kompleks ketika Jenderal Pel wafat pada Februari 1876 saat sedang memperluas lini pertahanan di Lamnyong. Kekosongan kepemimpinan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap 47 pos pertahanan yang telah dibangun. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pejuang Aceh untuk melancarkan serangan besar. Di saat yang hampir bersamaan, Habib Abdurrahman Al-Zahir kembali dari Turki, membawa semangat baru dan dukungan moral bagi perjuangan rakyat Aceh, sekaligus menandai fase baru dalam perlawanan terhadap Belanda (Ali, 2011).

Strategi Pembentukan Lini Cosentrasi

Pembangunan sistem pertahanan lini konsentrasi oleh Belanda merupakan respons terhadap meningkatnya intensitas perlawanan rakyat Aceh yang tak mampu diatasi dengan pendekatan militer konvensional. Pemerintah Hindia Belanda menghadapi kendala pembiayaan operasional, terutama karena kebutuhan penambahan pasukan yang terus meningkat. Strategi ini memungkinkan konsentrasi kekuatan militer di satu wilayah, sekaligus menekan pengeluaran logistik dan personil (Djajadiningrat, 1911; Reid, 2014).

Ide ini diusulkan oleh Menteri Pertahanan Jenderal A.W.P. Weitzel, yang berpendapat bahwa hanya dengan menyatukan kekuatan militer di satu wilayah konsentrasi maka efektivitas pertahanan dapat dicapai. Sistem ini mengubah pendekatan perang menjadi strategi defensif, di mana pasukan Belanda menunggu serangan musuh daripada melakukan ekspedisi aktif, sebagaimana terjadi dalam Perang Aceh sebelumnya (Van Dijk, 2007).

Lini konsentrasi mulai dibangun pada 20 Agustus 1884 dengan wilayah seluas 50 km² yang terdiri atas 16 benteng, dan pusat pertahanan berada di Kutaraja. Benteng-benteng tersebut ditempatkan dalam formasi setengah lingkaran terbuka ke arah laut, dilengkapi pagar kayu runcing dan meriam kaliber 7 atau 12 cm. Jumlah pasukan bervariasi di tiap benteng, dan infrastruktur pendukung seperti rel trem dan jaringan telepon dibangun untuk memperkuat komunikasi dan logistik (Laffan, 2003).

Kereta api, yang dikenal dengan nama Atjeh Tram, menjadi bagian penting dari strategi ini, digunakan untuk mengangkut logistik dan senjata dari pelabuhan Ulee Lheue ke Kutaraja dan pos-pos militer lainnya. Pembangunan jaringan ini dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum (BOW), dengan panjang rel awal 5 km dan kemudian diperpanjang ke berbagai wilayah hingga Lhokseumawe antara 1875–1910 (Kreule, 1982; Colombijn, 2005).

Lini konsentrasi juga dikelilingi zona kosong tanpa pemukiman dan pepohonan untuk memudahkan pengawasan. Selain pertahanan inti, benteng luar juga didirikan

sebagai garis perlindungan kedua. Pos-pos luar ini dibangun menyerupai bentuk “U” terbuka ke laut dan terhubung dengan lini utama di beberapa titik strategis, termasuk di sepanjang garis pantai Aceh yang diperkuat dengan pos di Idi, Sigli, dan Meulaboh (Reid, 2014).

Meski sistem pertahanan ini meningkatkan efisiensi logistik dan keamanan internal, namun juga berdampak negatif terhadap kesiapan tempur pasukan Belanda. Minimnya interaksi langsung dengan musuh mengurangi keterampilan tempur mereka. Meskipun demikian, ancaman dari pejuang Aceh tetap tinggi, dengan infiltrasi yang dilakukan hingga ke dalam wilayah pertahanan Belanda (Djajadiningrat, 1911).

Dalam rangka memperkuat kendali militer, pemerintah kolonial membentuk pasukan elite Marsose pada 20 April 1890. Pasukan ini terdiri dari orang-orang pribumi dari Jawa, Ambon, Manado, dan Timor yang dipilih karena keterampilan tempur mereka yang sesuai dengan kondisi medan di Aceh. Marsose beroperasi dalam unit kecil dan menggunakan taktik gerilya untuk menyerang wilayah-wilayah pejuang Aceh (Laffan, 2003; Kreule, 1982).

Marsose dibekali senjata pendek seperti karaben, kelewang, dan rencong, serta peralatan medan seperti sepatu dan pelindung kaki. Mereka sering menyusup ke pedalaman Aceh, menyusuri rawa dan sungai. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan survival dan mobilitas tinggi dalam hutan tropis (Colombijn, 2005). Penggunaan pasukan pribumi juga karena Belanda tidak mengenal secara mendalam kondisi geografis Aceh, meskipun memiliki data teritorial.

Untuk mendukung logistik Marsose, Belanda mengandalkan pedati, gajah, dan kereta api berlapis baja yang dijalankan dengan tenaga kerja paksa. Gangguan dari pejuang Aceh berupa sabotase terhadap rel kereta dan jaringan komunikasi sering terjadi, termasuk penggunaan granat sebagai ranjau darat dan pemotongan kabel telegraf (Reid, 2014; Djajadiningrat, 1911).

Selama periode ini, penasihat kolonial Snouck Hurgronje melakukan penelitian sosial-politik di Aceh pada 1891–1892, menyimpulkan bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan dengan pertahanan pasif semata. Ia menyarankan pendekatan agresif karena perjuangan Aceh bersifat religius dan dipimpin oleh ulama, sehingga hanya bisa ditundukkan dengan kekuatan bersenjata (Hurgronje, 1906).

Namun, strategi lini juga melemah karena desersi sejumlah pasukan asing ke pihak Aceh. Dalam masa pertahanan ini, tercatat 18 tentara Belanda, Prancis, Belgia, Jerman, dan Luxemburg membelot dan bergabung dengan pasukan Aceh (Djajadiningrat, 1911).

Sementara itu, pada tahun 1893, Teuku Umar membuat strategi infiltrasi dengan berpura-pura tunduk kepada Belanda bersama 15 panglima, dan diberi gelar serta pasukan pribadi. Namun pada 1896, ia berbalik menyerang Belanda dengan membawa senjata dan perbekalan, menunjukkan bahwa strategi militer Belanda kerap dibalas dengan taktik yang lebih canggih dari pihak Aceh (Reid, 2014).

Dampak dari Pertahanan Lini Konsentrasi

Implementasi strategi lini konsentrasi oleh Belanda dalam Perang Aceh memberikan dampak yang sangat besar, baik dari sisi militer maupun sosial-ekonomi. Dari segi pembiayaan, konflik berkepanjangan ini menjadi beban berat bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam dua tahun awal perang (1873–1874), biaya militer mencapai 16,5 juta florin. Angka ini meningkat signifikan menjadi 21 juta florin pada 1875 dan 26,5 juta florin pada 1876. Hingga tahun 1884, total pengeluaran Belanda telah mencapai sekitar 150 juta florin, dan pada tahun 1891 jumlah tersebut bertambah hingga 200 juta florin (Ricklefs, 2008; Reid, 2014).

Selain beban finansial, Belanda juga mengalami kerugian besar dalam hal sumber daya manusia. Diperkirakan 1.280 serdadu Belanda tewas, dan lebih dari 5.200 lainnya terluka dalam periode tersebut. Salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya serdadu asing yang membelot ke pihak Aceh. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, tercatat sekitar 1.265 serdadu dari berbagai latar belakang – termasuk Belanda, Jerman, Prancis, Luxemburg, Swiss, dan prajurit kulit berwarna – membelot dan bergabung dengan perlawanan rakyat Aceh (Djajadiningrat, 1911).

Kekalahan militer Belanda yang paling terkenal adalah kegagalan Mayor Jenderal van der Heijden dalam dua kali penyerangan ke wilayah Samalanga. Kegagalan ini dikenal luas sebagai “Echec van Samalanga”, sebuah istilah yang mencerminkan aib militer kolonial dalam operasi besar yang gagal total (Laffan, 2003).

Belanda juga kehilangan sejumlah panglima perang mereka yang penting. Di antara tokoh militer yang gugur adalah Jenderal Kohler, Demmeni, Van Kerchem, dan De Moulin. Sementara itu, beberapa lainnya seperti Van der Heijden dan Van Teijn mengalami penurunan jabatan atau ditarik dari medan perang karena kegagalan strategis. Tindakan represif dan kebrutalan militer seperti yang dilakukan Van der Heijden justru menyulut perlawanan yang lebih kuat dari rakyat Aceh (Reid, 2005).

Kerugian strategis lainnya dialami saat Teuku Umar, yang sebelumnya berpura-pura loyal kepada Belanda, memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk mendapatkan logistik, senjata, dan kekuasaan lokal. Setelah memperoleh cukup kekuatan, ia berbalik melawan Belanda dan merebut kembali sejumlah wilayah penting seperti Cot Gue, Tungkop, dan Lam Kunyet. Aksi infiltrasi ini menjadi salah satu keberhasilan taktis paling signifikan dalam sejarah perlawanan Aceh (Alfian, 2006; Reid, 2014).

Meskipun demikian, Belanda juga mencatat beberapa keuntungan dari penerapan strategi pertahanan lini konsentrasi. Blokade yang dilakukan di sepanjang pantai timur dan barat Aceh memungkinkan mereka membatasi logistik dan komunikasi pasukan Aceh. Dengan memanfaatkan jaringan hubungan dengan sejumlah uleebalang lokal, Belanda mulai memperoleh akses ke beberapa wilayah strategis seperti Lamreung, Bukit Karang, hingga Ketapang Dua – meskipun masih gagal menguasai sepenuhnya kawasan penting seperti Dalam dan Ulee Lheue (Djajadiningrat, 1911).

Di pihak Aceh, dampak negatif dari perang sangat menyakitkan. Selain kehancuran fisik berupa hancurnya perkampungan dan perampasan harta benda, Belanda juga melakukan penghancuran situs-situs penting seperti makam raja-raja Aceh untuk digunakan sebagai bahan bangunan benteng. Tindakan ini merupakan bentuk simbolik penghinaan terhadap sejarah dan warisan budaya Aceh (Laffan, 2003).

Beban ekonomi juga bertambah karena Belanda memberlakukan denda berat kepada uleebalang yang berhasil ditundukkan. Akibatnya, beban tersebut dialihkan ke rakyat, yang dipaksa melakukan kerja paksa (kerja rodi) demi memenuhi kebutuhan logistik kolonial. Ini menciptakan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat Aceh secara kolektif (Reid, 2005).

Korban jiwa di pihak Aceh pun sangat besar. Di antara tokoh penting yang gugur adalah Sultan Mahmud Syah II, Tuanku Hasyim, Teuku Imuem Lueng Bata, dan Teungku Mat Amin Di Tiro. Dari total 2.549 korban jiwa yang tercatat dalam periode tertentu, hampir 40 persen merupakan perempuan dan anak-anak. Hal ini mencerminkan sifat brutal dari konflik yang menyerang semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu (Alfian, 2006).

Terlepas dari korban yang begitu besar, semangat perjuangan rakyat Aceh justru semakin membara. Peran ulama dalam menggerakkan masyarakat untuk terus melakukan jihad fi sabilillah menjadi kunci dari ketahanan sosial Aceh dalam menghadapi kekuatan kolonial. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga komandan militer yang efektif di medan perang (Laffan, 2011).

Pengalaman panjang dalam menghadapi kolonialisme ini meninggalkan warisan historis yang penting bagi bangsa Indonesia. Perlawanan gigih rakyat Aceh menjadi simbol perlawanan nasional terhadap ketidakadilan dan penjajahan. Memahami penderitaan dan pengorbanan generasi terdahulu menjadi penting sebagai fondasi kesadaran historis bangsa, serta pengingat akan mahalnya harga dari kemerdekaan yang kini dinikmati.

Perbandingan dengan Strategi Kolonial di Daerah Lain

Jika dibandingkan dengan strategi kolonial Belanda di daerah lain seperti Jawa atau Minangkabau, *concentratie stelsel* di Aceh menunjukkan karakter yang lebih defensif dan berjangka panjang. Di Jawa, Belanda lebih banyak menggunakan pendekatan administratif dan kooptasi birokratis, sedangkan di Minangkabau strategi militer lebih banyak dikombinasikan dengan penyebaran budaya Barat dan pendidikan.

Sementara itu, di Aceh, karena basis perlawanan sangat kuat dan ditopang oleh agama, strategi yang digunakan harus lebih adaptif terhadap konflik ideologis. Oleh karena itu, strategi konsentrasi tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan militer, tetapi juga dari kegagalannya dalam menjinakkan perlawanan ideologis yang bersifat akar rumput.

Sejarawan seperti Van Dijk (2007) mencatat bahwa Belanda membutuhkan waktu hampir tiga dekade hanya untuk menundukkan wilayah pesisir Aceh secara penuh. Bahkan setelah penerapan *concentratie stelsel*, peperangan terus berlangsung hingga awal abad ke-20, membuktikan bahwa strategi militer tanpa penyelesaian sosial dan ideologis tidak cukup dalam menghadapi Aceh.

Refleksi Historis terhadap Strategi Concentratie Stelsel

Menganalisis *concentratie stelsel* dari sudut pandang sejarah militer menunjukkan bahwa strategi ini tidak semata-mata sebuah inovasi taktik, tetapi juga merupakan bentuk kompromi antara ambisi kolonial Belanda dan realitas medan pertempuran di Aceh. Strategi tersebut mengadopsi prinsip pertahanan teritorial berlapis, yang mengedepankan pengamanan pusat kekuasaan dan jalur logistik daripada konfrontasi langsung yang terus-menerus dengan pasukan pejuang Aceh.

Dalam konteks ini, strategi tersebut mencerminkan prinsip "minimalisasi kerugian" dan "maksimalisasi kontrol" sebagaimana dikembangkan dalam teori perang kolonial. Hal ini sejalan dengan pemikiran Carl von Clausewitz dalam bukunya *On War* (1832), di mana strategi militer efektif tidak selalu berarti kemenangan mutlak di medan perang, tetapi kemampuan mempertahankan wilayah kunci dengan biaya minimum dan hasil maksimum.

Namun, keunggulan teknis Belanda melalui konsentrasi pertahanan tidak serta merta mampu menundukkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perang yang didasarkan pada perlawanan ideologis dan keagamaan, superioritas militer dapat menjadi relatif jika tidak disertai pendekatan sosio-kultural yang tepat (Reid, 2005).

Keberhasilan dan Keterbatasan Strategi

Keberhasilan utama *concentratie stelsel* terletak pada kemampuannya menstabilkan wilayah Kutaraja dan membentuk basis pertahanan yang relatif aman dari serangan mendadak. Dengan menciptakan zona aman seluas sekitar 50 km² dan membentengi kawasan-kawasan strategis dengan pos militer, Belanda berhasil mengendalikan pusat administratif dan pelabuhan penting sebagai jalur keluar-masuk komoditas serta pasukan (Mandasari, 2020).

Namun, keberhasilan tersebut juga disertai sejumlah keterbatasan. Pertama, efektivitas strategi ini terbatas pada zona konsentrasi saja. Di luar garis pertahanan, pasukan Aceh masih dapat bergerak secara leluasa dan mengganggu jalur suplai atau melakukan serangan gerilya. Kedua, strategi ini menciptakan fragmentasi sosial di kalangan rakyat Aceh, karena adanya pemisahan antara wilayah yang dianggap "aman" dan "berbahaya" menurut Belanda.

Keterbatasan ini diperparah oleh ketergantungan Belanda pada informasi intelijen yang sering kali tidak akurat, serta perlawanan bawah tanah dari masyarakat yang

berpindah dari konfrontasi terbuka menjadi sabotase dan infiltrasi ke dalam sistem kolonial. Kondisi ini menyebabkan perang berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan semula oleh pihak Belanda.

Selain keberhasilan stabilisasi wilayah Kutaraja dan penghematan logistik, strategi ini juga memberikan keunggulan dalam aspek komunikasi militer. Dengan terkonsentrasinya pasukan dalam satu garis yang terhubung oleh jalan dan pos jaga, koordinasi dan pengiriman instruksi menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan Belanda untuk merespons lebih cepat terhadap gangguan keamanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap rakyat Aceh.

Namun demikian, terdapat juga implikasi psikologis dan sosial dari penerapan strategi ini. Pembangunan garis pertahanan sering kali mengabaikan struktur sosial lokal, sehingga menyebabkan relokasi paksa dan kerusakan terhadap pola pemukiman tradisional masyarakat Aceh. Dampaknya, banyak rakyat yang mengalami dislokasi sosial dan ekonomi, terutama mereka yang hidup di luar garis konsentrasi dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam serta pasar.

Selain itu, strategi ini menimbulkan resistensi kultural yang lebih dalam. Kehadiran pos militer yang ketat justru memperkuat identitas kolektif rakyat Aceh sebagai kelompok yang dijajah. Maka, walaupun secara fisik Belanda menguasai wilayah dalam garis konsentrasi, secara ideologis dan emosional, masyarakat tetap menolak dominasi kolonial. Ini menunjukkan bahwa penguasaan wilayah secara militer tidak selalu berarti penaklukan menyeluruh jika tidak disertai pendekatan kemanusiaan dan diplomatik (Said, 1998).

Kritik lainnya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap pusat kekuasaan di Kutaraja. Ketika terjadi gangguan pasokan atau pemberontakan skala besar, struktur pertahanan yang terlalu terpusat ini menjadi rentan. Strategi ini juga menempatkan beban besar pada garnisun dan komandan lokal, yang kadang-kadang tidak memiliki fleksibilitas operasional untuk menangani variasi medan dan kondisi sosiopolitik desa-desa Aceh yang kompleks.

Oleh karena itu, walaupun *concentratie stelsel* dapat dianggap sebagai pencapaian strategis dalam konteks kolonialisme Belanda, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan Belanda dalam menyeimbangkan kekuatan militer dengan pendekatan kemasyarakatan. Kelemahan dalam memahami dinamika lokal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa Perang Aceh berlangsung sangat lama dan penuh korban.

Relevansi Strategi dalam Kajian Kontemporer

Strategi *concentratie stelsel* dapat dilihat sebagai salah satu bentuk awal dari konsep *counterinsurgency* (operasi kontra-pemberontakan) yang berkembang dalam perang modern. Prinsip-prinsip seperti konsolidasi wilayah, pemisahan antara musuh dan

penduduk sipil, serta pembangunan pos kontrol merupakan praktik yang terus direplikasi dalam berbagai konflik pasca-kolonial, seperti di Vietnam, Aljazair, dan Irak.

Namun, seperti ditunjukkan oleh pengalaman Belanda di Aceh, keberhasilan militer dalam kerangka kontra-pemberontakan sangat tergantung pada pemahaman sosial-budaya lokal. Ketika pendekatan militer bersifat mekanistik dan tidak memperhatikan dinamika kultural dan spiritual masyarakat, maka perlawanan akan terus berlangsung dalam berbagai bentuk.

Dalam konteks itu, *concentratie stelsel* harus dipahami sebagai pelajaran berharga bagi perancang strategi militer dan pengkaji sejarah konflik bahwa dominasi teritorial tidak menjamin berakhirnya perlawanan selama akar ideologis tidak diatasi secara holistik (Jong, 1983).

Strategi pertahanan Belanda di Kutaraja melalui *concentratie stelsel* tidak hanya penting sebagai bagian dari sejarah kolonial di Indonesia, tetapi juga relevan untuk dianalisis dalam konteks kajian kontemporer mengenai strategi militer dan pengelolaan konflik asimetris. Konsep konsentrasi pasukan, pengendalian ruang, dan pembangunan infrastruktur pendukung pertahanan seperti pos militer dan jalan komunikasi tetap menjadi prinsip dasar dalam operasi militer modern, khususnya dalam upaya stabilisasi pascakonflik.

Strategi ini menunjukkan bahwa dalam perang melawan kelompok non-negara seperti para pejuang Aceh, keberhasilan militer tidak hanya tergantung pada superioritas senjata, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan populasi dan ruang hidup lawan. Saat ini, pendekatan serupa dapat dilihat dalam berbagai operasi penjagaan perdamaian dan kontra-insurgensi yang dilakukan oleh pasukan internasional, seperti yang dilakukan oleh NATO di Afghanistan atau operasi militer di wilayah Timur Tengah. Di sana, pembangunan basis militer strategis dan kontrol terhadap pusat populasi dilakukan guna menekan pergerakan pasukan lawan (Kilcullen, 2009).

Namun, pelajaran penting dari strategi Belanda adalah bahwa penguasaan militer yang tidak diiringi pendekatan kultural dan sosial akan menciptakan resistensi jangka panjang. Hal ini terlihat dari kegagalan Belanda untuk meredam semangat jihad rakyat Aceh meskipun wilayah mereka telah dikuasai secara geografis. Dalam konteks modern, banyak negara telah belajar bahwa strategi militer harus dilengkapi dengan program *winning hearts and minds*—upaya memenangkan simpati masyarakat melalui pembangunan, rekonsiliasi, dan keadilan sosial (Petraeus & Amos, 2006).

Selain itu, strategi *concentratie stelsel* memberikan inspirasi bagi studi tentang urban warfare dan pertahanan teritorial di negara-negara berkembang yang memiliki risiko konflik internal. Pengalaman Belanda di Aceh menunjukkan bahwa pengendalian ruang dan logistik dapat menjadi kekuatan strategis bila dipadukan dengan pemetaan sosial dan pemahaman budaya lokal. Strategi ini mengindikasikan pentingnya geostrategi lokal dalam menentukan keberhasilan operasi militer secara keseluruhan (Anderson, 2006).

Namun demikian, dalam kajian kontemporer juga perlu dikritisi bahwa model ini dapat menciptakan segregasi ruang dan pelanggaran HAM jika dilakukan secara represif dan tanpa legitimasi politik. Karenanya, warisan *concentratie stelsel* harus dipahami secara kritis agar tidak menjadi justifikasi untuk kebijakan militeristik di masa kini.

Kesimpulan

Implementasi strategi lini konsentrasi oleh Belanda dalam Perang Aceh memberikan dampak signifikan baik secara militer maupun sosial-ekonomi. Dari segi finansial, konflik ini menjadi beban berat bagi pemerintah Hindia Belanda, dengan pengeluaran militer yang meningkat drastis dari 16,5 juta florin pada tahun 1873–1874 menjadi 200 juta florin pada tahun 1891.

Belanda juga mengalami kerugian besar dalam sumber daya manusia, dengan sekitar 1.280 serdadu tewas dan lebih dari 5.200 terluka. Banyak serdadu asing yang membelot ke pihak Aceh, menambah tantangan bagi Belanda. Kegagalan Mayor Jenderal van der Heijden dalam penyerangan ke Samalanga menjadi salah satu momen paling memalukan bagi militer kolonial.

Di sisi lain, meskipun Belanda berhasil membatasi logistik pasukan Aceh, dampak perang bagi masyarakat Aceh sangat menyakitkan. Kehancuran fisik dan penghancuran situs-situs penting Aceh menjadi simbol penghinaan terhadap warisan budaya mereka. Beban ekonomi meningkat akibat denda berat yang dikenakan kepada *uleebalang*, yang berdampak pada rakyat melalui kerja paksa.

Korban jiwa di pihak Aceh juga sangat besar, dengan banyak tokoh penting gugur, termasuk Sultan Mahmud Syah II. Meskipun mengalami banyak kerugian, semangat perjuangan rakyat Aceh tetap membara, didorong oleh peran ulama yang menggerakkan masyarakat untuk terus berjuang. Pengalaman ini meninggalkan warisan historis yang penting bagi bangsa Indonesia, menjadikan perlawanan Aceh sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penjajahan.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Colombijn, F. (2005). *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing During the Decolonization of Indonesia, 1930–1960*. KITLV Press.
- Cribb, R. (2001). *Historical Atlas of Indonesia*. University of Hawai'i Press.
- Djajadiningrat, H. (1911). *Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het soeltanaat van Atjeh*. Leiden: Brill.
- Djajadiningrat, H. (1911). *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*. Leiden: Brill.
- Hurgronje, C. Snouck. (1906). *The Achehnese* (Vol. I–II, A.W.S. O'Sullivan, Trans.). Leiden: Brill.
- Ismail, M. (2010). *Aceh dalam Sejarah dan Budaya*. Banda Aceh: Pustaka Ilmu.

- Jong, L. de. (1983). *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog*. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.
- Kilcullen, D. (2009). *The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One*. Oxford University Press.
- Kreule, J. (1982). *Spoorwegen op Sumatra en Java*. Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen.
- Laffan, M. F. (2003). *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*. RoutledgeCurzon.
- Mandasari, C. M. (2020). *Strategi Pertahanan Belanda di Kutaraja (1884-1898)*. Banda Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora.
- Petraeus, D., & Amos, J. F. (2006). *Counterinsurgency Field Manual (FM 3-24)*. U.S. Army and Marine Corps.
- Reid, A. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid, A. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Reid, A. (2005). *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*. Leiden: KITLV Press.
- Reid, A. (2014). *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*. NUS Press.
- Said, M. (1998). *Aceh Sepanjang Abad*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Van Dijk, C. (1981). *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Van Dijk, C. (2007). *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. Brill.
- Van Dijk, Kees. (2007). *A Country in Despair: Indonesia Between 1997 and 2000*. Leiden: KITLV Press.